

**OPINI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN OTORITAS NEGARA TERKAIT PEMBLOKIRAN
LAYANAN DATA TELEKOMUNIKASI DI PAPUA DAN PAPUA BARAT
(SURVEI PADA PUBLIK GMNI BANDUNG)**

***PUBLIC OPINION ON POLICY OF STATE AUTHORITIES RELATED TO BLOCKING
TELECOMMUNICATION DATA SERVICES IN WEST PAPUA AND PAPUA
(SURVEY OF PUBLIC GMNI BANDUNG)***

Siti Damayanti Zahro, Kharisma Nasionalita

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom

Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu No. 1 Bandung, Jawa Barat 40257

Email: mayaazahro@student.telkomuniversity.ac.id , nasionalita.kharisma@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Opini Publik GMNI Bandung tentang Kebijakan Otoritas Negara Terkait Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi. Kebijakannya dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 21 Agustus sampai 23 September 2019. Kebijakan yang bertujuan untuk membuat Papua aman dan kondusif kembali. Namun banyak pendapat pro dan kontra dari masyarakat. Kebijakan ini berlangsung selama 34 hari, terhitung sejak 21 Agustus 2019 sampai 23 September 2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data univariat dengan jenis distribusi frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan responden 87 yang didapat dengan teknik *simple random sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah publik memberikan opini “Tidak Setuju”. Dengan demikian publik GMNI Bandung kontra terhadap kebijakan otoritas negara terkait internet di Papua.

Kata kunci : Opini Publik, Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the Bandung GMNI Public Opinion on State Authority Policies Regarding the Blocking of Telecommunications Data Services. The policy was made by the Ministry of Communication and Information on 21 August to 23 September 2019. The policy aims to make Papua safe and conducive again. But many opinions pros and cons from the public. This policy lasts for 34 days, starting from August 21, 2019 to September 23, 2019. This study uses univariate data analysis techniques with a type of frequency distribution. The method used was a survey method with 87 respondents obtained by simple random sampling technique. The conclusion of this research is that the public gives a "Disagree" opinion. Thus GMNI Bandung public counter to the policy of state authorities related to the internet in Papua.

Keywords: Public Opinion, Blocking of Telecommunications Data Services.

PENDAHULUAN

Pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai 23 September 2019, membuat media daring banyak memberitakan kebijakan tersebut dan menuai banyak opini pro dan kontra seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengkritiki kebijakan ini karena menurut Komisaris tinggi HAM PBB yaitu Michelle Bachelet mengatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat warga negara dan kebijakan ini juga membatasi komunikasi warga negara yang akhirnya memperuncing ketegangan. PBB juga mendesak Indonesia untuk menghentikan kebijakan ini dan menyelesaikan masalah dengan cara dialog dan sebaiknya pembuat otoritas kebijakan ini tidak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Ini berarti polemiknya tidak hanya dalam negeri tetapi juga sampai ke luar negeri. Komnas HAM juga mengkritiki kebijakan ini, menurut Komnas HAM kebijakan ini membuat masyarakat tidak pasti dalam mendapatkan informasi dari internet, terlebih menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Papua juga sebagai penetrasi internet tertinggi di Indonesia Timur. Sebelumnya peneliti saat melakukan kegiatan magang di Kementerian Kominfo, peneliti sering menemui banyak wartawan dan masyarakat yang protes akan kebijakan pembatasan media sosial pada saat Pemilu, dan masyarakat yang dirugikan berharap kebijakan seperti ini tidak terulang lagi, namun ternyata pada bulan Agustus Kominfo menerapkan kebijakan ini kembali terhadap masyarakat Papua, tidak tanggung-tanggung kebijakannya bukan lagi pembatasan atau pelambatan namun memblokir keseluruhan akses internet. Sedangkan menurut Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan kebijakan ini dibuat untuk menghentikan hoax, hoax berita bohong, hoax yang memprovokasi dan hoax yang mengadu domba. Jadi menurut pemerintah pembuat kebijakan, pemblokiran internet di Papua adalah solusi untuk membuat keamanan Papua kondusif. Dengan demikian banyak opini pro, kontra bahkan netral dari masyarakat, dan ada 54 media daring yang memberitakan kebijakan ini selama satu bulan lebih.

Pemberitaan dari media daring bisa membentuk opini publik berdasarkan permasalahan yang diberitakan. Menurut Renald Kasali (2003) dalam Syahputra (2018:58), perkembangan opini individual menjadi opini publik itu terjadi dengan beberapa tahapan yaitu :

1. proses waktu yang di mana lamanya waktu yang diperlukan untuk membentuk opini publik berdasarkan persamaan persepsi, adanya unsur emosi, kepercayaan terhadap isu berita yang tengah berkembang.
2. Cakupan atau luasan publik, pembentukan opini publik berawal dari kelompok yang kecil lalu menjadi kelompok yang lebih besar atau luas.
3. Pengalaman dari masa lalu, masyarakat yang memiliki pengalaman terhadap isu berita yang sedang dibicarakan.
4. Tokoh atau aktor pelaku, tokoh yang diekspos oleh media massa baik itu politikus, eksekutif, tokoh keagamaan, maupun masyarakat.
5. Media massa dijadikan sebagai media pembentuk opini publik, dimana opini publik terbentuk karena adanya berita yang ditampilkan oleh media massa.

Opini Publik menurut Nimmo (1978) (dalam Syahputra 2018:8), yaitu proses penggabungan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perbantahan, serta perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Doob (1971) dalam Syahputra (2018:8) Ilmu psikologi mendefinisikan opini publik sebagai hasil dari sikap sekumpulan orang (masyarakat) yang memperlihatkan reaksi yang sama

terhadap rangsangan yang sama dari luar. Sedangkan menurut Bareslon (1941) dalam Syahputra (2018:7) opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu juga.

Pembentukan opini publik berdasarkan media daring memang sangat besar pengaruhnya, apa yang masyarakat baca, lihat, dengar bahkan rasakan bisa secara cepat membuat opini. Seperti saat ini mengenai surat putusan pemblokiran internet atau layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat berdasarkan Siaran Pers pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 tentang pemblokiran layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat yang dijelaskan dalam siaran pers tersebut, kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua. Isi dari siaran pers tersebut menyatakan bahwa Kemkominfo melakukan kebijakan pemblokiran sementara layanan Data, mulai Rabu 21 Agustus 2019 sampai suasana Papua dan Papua Barat kembali kondusif dan normal. Dengan permasalahan ini, akan banyak opini yang terbentuk. Peneliti akan meneliti opini publik GMNI Bandung, karena menurut Netralnews.com GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah organisasi nasional yang telah terbentuk sejak 22 Maret 1954 hasil dari gabungan tiga organisasi mahasiswa, yaitu Mahasiswa Demokrat Indonesia, Mahasiswa Marhaenis dan Gerakan Mahasiswa Merdeka. GMNI hasil dari ajaran presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno dan hasil dari peleburan organisasi mahasiswa. GMNI sebagai organisasi mahasiswa yang aktif mengkritiki isu politik. GMNI Bandung, tidak hanya bergerak dalam menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah atau politik tetapi juga membantu masyarakat Bandung, seperti melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama sesama anggota ataupun masyarakat, dan selain fokus terhadap isu politik Indonesia, kelebihan GMNI Bandung adalah memiliki kegiatan advokasi dengan masyarakat Bandung seperti dengan anak jalanan, pedagang kaki lima, sopir taxi dan angkutan umum konvensional, juga sebagai perantara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu menurut TribunJabar.id GMNI adalah organisasi mahasiswa yang berhaluan nasionalisme dengan watak sosial juga nasionalisme ditempatkan di atas nilai kemanusiaan.

LANDASAN TEORI

Komunikasi Politik

Komunikasi politik yaitu komunikasi yang melibatkan aktor-aktor politik dan pesan-pesan politik, atau yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintah juga kebijakan pemerintah. Menurut Nimmo (1993:9), komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Jadi komunikasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia dan negara karena manusia harus mengatur diri, kelompok, masyarakat, dan lingkungannya agar dinamis serta terukur seperti halnya politik yang tidak lepas dari kehidupan manusia, entah itu kegiatan sehari-hari maupun dalam pemerintahan seperti kebijakan pemerintah.

Opini Publik

Opini publik menurut Nimmo (1978) dalam Syahputra (2018:8) yaitu proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, juga usul yang diungkapkan warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik dan perbantahan, serta perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Maka berikut penjelasan mengenai elemen-elemen dari opini publik menurut Dan Nimmo (1978) yaitu :

1. Pikiran : apa yang ada dalam diri manusia yang disebut gagasan yang menjadi kemungkinan, menjadi tujuan, lalu lahirlah perbuatan dan menjadi kenyataan (Elfky, 2009:268). Jadi setiap pemberian opini berdasarkan pikiran terlebih dahulu, apa yang ada di pikiran bisa mempengaruhi opini tersebut.
 - a. Kemungkinan : opini yang akan terbentuk karena peristiwa atau kata-kata yang merupakan peristiwa (Wahid, 2016:149)
 - b. Tujuan : terdapat isi, arah, dan intensitas mengenai opini publik Nimmo (2009:25) dalam Wahid (2016:148)
 - c. Perbuatan : semua proses dan tindakan dalam pembentukan opini adalah sebuah tindakan yang terencana serta terkendali (Wahid, 2016:143)
 - d. Kenyataan : Opini publik bereaksi terhadap suatu kejadian atau keadaan (Wahid, 2016:149)
2. Perasaan : dalam Ahmadi (1998:101) suatu keadaan atau kejiwaan yang dialami manusia dengan senang atau tidak senang yang berhubungan dengan peristiwa dan bersifat subyektif. Jadi peran perasaan dalam beropini juga berpengaruh, di mana perasaan senang atau tidak senang bisa memicu seseorang mengungkapkan opininya berdasarkan apa yang dia rasa.
 - a. Senang : menimbulkan perasaan puas yang berkaitan dengan masalah (Daldiyono, 2013:183)
 - b. Tidak senang : perasaan yang timbul berdasarkan suatu evaluasi dari pengalaman (Daldiyono, 2013:183)
3. Usul yang diungkapkan oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah dalam situasi yang mengandung konflik dan perbantahan : menyatakan opini pribadi terhadap para pejabat publik (Nimmo, 1993:12). Jadi ini berarti warga negara yang berhak memberikan pendapatnya mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang di mana kebijakan ini mengandung konflik ataupun perbantahan sehingga warga negara memberikan usul atau anjuran maupun pandangannya terhadap pemerintah yang membuat kebijakan tersebut.
 - a. Opini pribadi : persepsi terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat (Syahputra, 2018:7)
4. Pendapat : dalam Syahputra (2018:2) pendapat atau opini adalah penilaian, sudut pandang, atau pernyataan yang sifatnya tidak memiliki landasan kepastian. Ini berarti setiap pendapat seseorang berdasarkan penilaian dan sudut pandang yang akhirnya menjadi pernyataan. Pendapat tidak memiliki landasan kepastian, bisa berlandaskan apa saja entah komunikasi dengan orang lain, terpengaruh berita di media ataupun berdasarkan pengalamannya.
 - a. Penilaian : opini ditentukan oleh kepentingan pribadi, peristiwa, kata-kata dan hal lain yang memengaruhi opini (Wahid, 2016:149)
 - b. Sudut pandang : pandangan yang berkaitan dengan suatu isu yang dianggap penting dan umum (Mukarom, 2016:160)
 - c. pernyataan : pernyataan atau tindakan hanya bisa dilakukan pada saat opini belum terbentuk (Wahid, 2016:149)

Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik, dalam usaha untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapai tujuan yang sudah dipilih. Biasanya pihak yang membuat kebijakan itu ialah yang memiliki kekuasaan dan berwenang untuk melaksanakannya. (Budiardjo, 2008:20). Menurut David Easton dalam Budiardjo (2008:21) ilmu politik itu studi mengenai terbentuknya kebijakan. Kehidupan politik memiliki macam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan pemerintah yang diterima masyarakat, dan memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Otoritas Negara

Negara adalah integrasi dan organisasi yang pokok dari kekuasaan politik. Negara juga bisa disebut alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan guna mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara dapat memaksakan kekuasaannya dengan sah kepada semua golongan kekuasaan lain dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara juga menetapkan cara-cara dan batasan sampai mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. (Budiardjo, 2008:48). Dengan demikian, negara memiliki dua tugas yaitu :

- a. Mengatur dan mengendalikan kekuasaan yang asosial atau bertentangan satu sama lain, agar tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
- b. Mengintegrasikan dan mengorganisir kegiatan masyarakat ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya atau nasional.

Menurut Roger H. Soltau (dalam Budiardjo, 2008:48) negara adalah agen atau kewenangan yang mengendalikan ataupun mengatur setiap persoalan atas nama masyarakat. Menurut Budiardjo (2008:50) negara pada umumnya memiliki sifat monopoli yang berarti negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama, sifat memaksa dalam arti memiliki kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal dalam sarana polisi, tentara dan sebagainya, sifat memaksa juga agar peraturan perundang-undangan ditaati dengan begitu penertiban dalam masyarakat tercapai dan anarki dapat dicegah, lalu sifat mencakup semua ini berarti semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Unsur-unsur negara terdapat wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Tujuan dari negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila).

Negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu :

1. Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Pertahanan.
4. Menegakkan keadilan.

Otoritas negara berarti kekuasaan atau wewenang yang sah yang dilakukan oleh negara atau pihak yang berwenang dalam negara (pemerintah).

Internet

Internet singkatan dari *interconnected networking* adalah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Internet terhubung di seluruh dunia, komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan wilayah dan waktu yang tidak terbatas (Sudarma & Jarot, 2012:1). Pengguna internet semakin besar dan berkembang, internet memiliki pengaruh yang besar atas ilmu dan pandangan dunia. Pengguna di seluruh dunia bisa mengakses internet dengan

mudah hanya bermodalkan alat komunikasi yang mampu mengakses internet, Wi-Fi atau layanan data (koneksi internet), dan akun untuk mengakses internet.

Internet dari sudut teknis adalah jaringan komputer yang ada di seluruh dunia, yang bisa saling bertukar informasi. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan, internet itu sebuah perpustakaan yang sangat besar terdapat jutaan bahkan milyaran jurnal, buku, artikel, foto, dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Internet adalah gudang informasi tanpa batas yang mudah diakses. (Samuel & Rahmayanto, 1997:1-2)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian, di mana analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2018:15). Jadi penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang objektif dan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Untuk mendapatkan data digunakan instrumen penelitian, lalu setelah data sudah terkumpul selanjutnya peneliti menganalisis secara kuantitatif dengan statistik. Sehingga peneliti bisa membuktikan hipotesis yang dirumuskan, terbukti atau tidak berdasarkan perhitungan statistik dari kuesioner yang dibagikan kepada koresponden.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dengan paradigma positivisme dan teknik analisis data univariat.

Dalam penelitian ini populasinya adalah anggota organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung. Menurut Antonius selaku ketua GMNI Bandung dan data yang telah diterima peneliti dari GMNI Bandung yaitu sebanyak 111 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan probability sampling dengan teknik *simple random sampling* (sampel random sederhana). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan sampel Slovin bertujuan menentukan jumlah minimal sampel yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Populasi penelitian adalah 111 anggota GMNI Bandung dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%. Maka perhitungan menggunakan rumus Slovin didapatkan hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{111}{1 + 111(0,05)^2} = 86,88 = 87$$

Kuesioner disebarakan kepada sampel atau responden secara *online* menggunakan Google Form. Responden akan menjawab pertanyaan pada kuesioner yang disebarakan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pengeolahan data dengan bantuan *software SPSS*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dihitung, penelitian ini mendapatkan hasil “Tidak Setuju”. Ini berarti opini publik GMNI Bandung tentang kebijakan pemblokiran internet yang terjadi di Papua pada 21 Agustus 2019 sampai 23 September 2019 yaitu “Tidak Setuju” atau kontra. Berdasarkan perhitungan dengan teknik analisis data univariat dengan jenis distribusi frekuensi dengan menambahkan persentase menggunakan garis kontinum, keempat dimensi terdiri dari pikiran dengan hasil “Tidak Setuju” memperoleh skor 1.702 dengan persentase 48,9%, dimensi variabel perasaan memperoleh hasil “Netral” dengan total skor 995 dan persentase 57,1%, dimensi variabel usul warga negara memperoleh hasil “Sangat Tidak Setuju” dengan total skor 321 dan persentase 26,9%, dan pendapat memperoleh hasil “Sangat Tidak Setuju” dengan jumlah skor 1.436 dan persentase 35,4%, total keseluruhan skor adalah 4.454 dan persentase 51,1% masuk dalam kategori “Tidak Setuju”. Dengan demikian opini publik GMNI Bandung tentang kebijakan otoritas negara terkait internet adalah “Tidak Setuju” atau kontra dengan kebijakan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian mengenai “opini publik GMNI Bandung tentang kebijakan otoritas negara terkait internet” maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi dengan menggunakan garis kontinum, setelah ditotal semua skor dari keempat dimensi yaitu pikiran, perasaan, usul warga negara, dan pendapat, didapatkan jumlah skor total keseluruhan 4.454 dengan persentase 51,1% dalam kategori “Tidak Setuju”. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Opini Publik GMNI Bandung berdasarkan perhitungan distribusi frekuensi dan garis kontinum adalah “Tidak Setuju” atau kontra pada kebijakan otoritas negara terkait internet di Papua pada tanggal 21 Agustus sampai 23 September 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 1998. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Baihaqi, A. 2019. *Menkominfo Jelaskan Alasan Tetap Blokir Internet di Papua dan Papua Barat*.
<https://news.detik.com/berita/d-4679450/menkominfo-jelaskan-alasan-tetap-blokir-internet-di-papua-dan-papua-barat>.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Busro, Muh. 2015. *Bahasa dan Pikiran*. . El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama. Vol 3 No 1.
- Daldiyono. 2009. *How to Be a Real and Successful Student*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elfiky, Ibrahim. 2009. *Terapi Berpikir Positif*. Jakarta: Zaman.
- Jayani, D. 2019. *Internet Sempat Diblokir, Berapa Penetrasi Internet di Papua dan Papua Barat?*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/04/internet-sempat-diblokir-berapa-penetrasi-internet-di-papua-dan-papua-barat>.
- Jemadu, Liberty. 2019. *PBB: Blokir Internet di Papua Langgar Hak atas Kebebasan Berpendapat*.
<https://www.suara.com/teknologi/2019/09/04/200754/pbb-blokir-internet-di-papua-langgar-hak-atas-kebebasan-berpendapat>.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik*. Bandung: Goodyear Publishing Co.
- Pratomo, Yudha. 2019. *APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*.
<https://teknologi.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>.
- Ramadhan, A. 2019. *Komnas HAM: Pemblokiran Internet di Papua Melanggar HAM*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/15372721/komnas-ham-pemblokiran-internet-di-papua-melanggar-ham>.
- Samuel, E., dan Rahmayanto, A. 1997. *Microsoft Internet Solution*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setu, Ferdinandus. 2019. *Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers.
- Singarimbun, S., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarma dan Jarot, S. 2012. *Buku Super Pintar Internet*. Jakarta: PT Transmedia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, cv

Syahputra, Iswandi. 2018. *Opini Publik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Wahid, Umaimah. 2016. *Komunikasi Politik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Warsudi, Agus. 2019. *Aktivis GMNI dan ICMI Ajak Warga Bandung Sukseskan Asian Games 2018*.

<https://jabar.sindonews.com/read/471/2/aktivis-gmni-dan-icmi-ajak-warga-bandung-sukseskan-asian-games-2018-1533654517>.

